KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Fasilitas DPR:Optimalkan Gedung yang Ada
Tanggal : Selasa, 15 Agustus 2017
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

FASILITAS DPR

Optimalkan Gedung yang Ada

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat sepatutnya mengoptimalkan fasilitas gedung yang sudah ada. Anggota DPR dinilai tidak patut mengusulkan pembangunan gedung baru dan penambahan fasilitas karena kinerja mereka rendah.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, di Jakarta, Senin (14/8), mengatakan, anggota DPR tidak patut mengusulkan penambahan fasilitas baru. Sebab, kinerja DPR tidak mencapai target, misalnya pemenuhan target produk legislasi, yang rata-rata hanya 10 persen per tahun.

"DPR seharusnya mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada ketimbang menuntut fasilitas baru. Hal itu tidak patut secara moral," tutur Syamsuddin.

Seperti diketahui, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pada 25 Juli 2017, menyampaikan pagu anggaran DPR tahun 2018 sebesar Rp 5,7 triliun. Nilai tersebut lebih rendah dari usulan DPR yang mencapai Rp 7,2 triliun atau naik Rp 3 triliun dari Rp 4,2 triliun tahun 2017.

Namun, DPR masih *ngotot* menuntut pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp 7,2 triliun. Sebab, jumlah alokasi itu bisa berubah tergantung kesepakatan kedua pihak ketika pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018. Tambahan anggaran itu dibutuhkan DPR untuk pembangunan Kompleks Parlemen di Senayan, mulai dari gedung baru, museum, perpustakaan, apartemen untuk anggota DPR, hingga alun-alun sebagai tempat unjuk rasa. DPR akan tetap meminta pemerintah mengabulkan usulan anggaran tahun 2018 sebesar Rp 7,2 triliun.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengungkapkan, dari Rp 5,7 triliun pagu anggaran 2018 yang telah disepakati pemerintah, anggaran untuk pembangunan kompleks parlemen mencapai Rp 500 miliar. Namun, jumlah itu baru untuk pembangunan gedung yang baru. Anton mencontohkan, pembangunan Gedung Nusantara 1 DPR membutuhkan pembiayaan lima tahun anggaran, dari 1993 hingga 1997.

"Kami tetap akan mengajukan Rp 7,2 triliun. Ini realitas kebutuhan, bahkan kami siap mengundang Menteri Keuangan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melihat langsung kondisi gedung parlemen," ujar Anton.

Belum dibahas

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Azis Syamsuddin mengatakan, rencana pembangunan sejumlah fasilitas baru di Kompleks Parlemen belum dibahas Banggar DPR. Bahkan, Banggar DPR juga belum menerima surat usulan BURT DPR terkait anggaran penataan Kompleks Parlemen.

"Saya belum tahu pembahasan (anggaran) itu karena belum menerima surat. Nanti baru akan mulai kami bahas sekitar bulan September," kata Azis. (SAN)